

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pemikiran awal penelitian tugas akhir berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan kerangka berpikir.

1.1 Latar Belakang

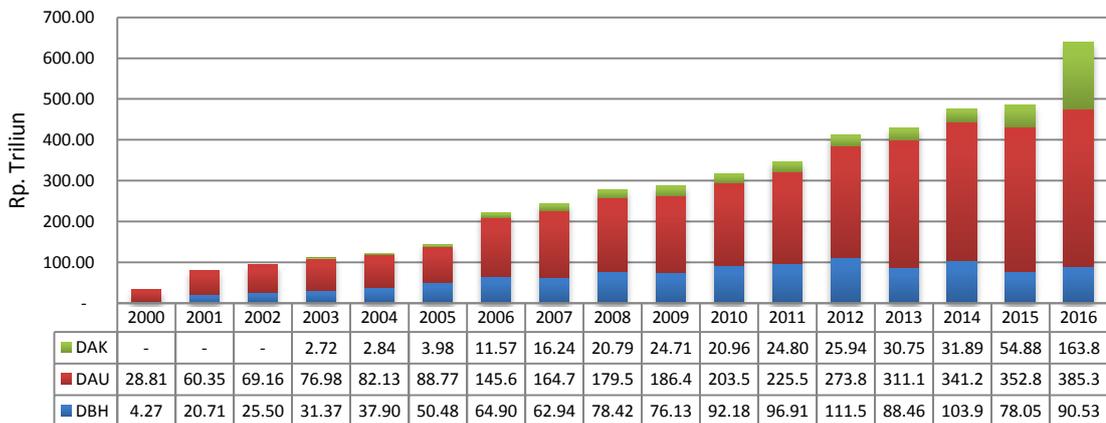
Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan yaitu dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Pada saat Indonesia menganut sistem sentralisasi seluruh aktivitas kepentingan daerah tidak boleh berbeda dengan kepentingan pusat. Setelah sejak era reformasi tahun 1999 Indonesia mengeluarkan kebijakan desentralisasi dimana arti desentralisasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia [1].

Undang – undang desentralisasi pertama kali diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah dan Otonomi Daerah yang telah diperbarui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diperbarui lagi hingga saat ini yang berlaku yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu juga terdapat undang – undang desentralisasi yang mengatur keuangannya yaitu UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang telah diperbarui menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Kedua undang – undang tentang perimbangan keuangan tersebut adalah bentuk desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia.

Desentralisasi fiskal yang terdapat pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan mengimplementasikan bagaimana pemerintah pusat memberikan bantuan dalam hal keuangan yang disebut sebagai dana perimbangan [2]. Sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dana perimbangan

terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang didalamnya terdiri atas pajak, cukai dan sumber daya alam [3]. Indonesia sejak diterapkannya desentralisasi fiskal terjadi proses pengalihan keuangan untuk dana perimbangan dengan jumlah yang signifikan dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 saat desentralisasi mulai aktif dilaksanakan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan sebesar Rp. 33,07 triliun dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 31,69% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 639,76 triliun [4].

Gambar 1.1
Perkembangan Dana Perimbangan Pusat Tahun 2000-2016



Sumber: Kementerian Keuangan, 2017

Dari grafik di atas besaran DAU pada tahun 2016 yaitu Rp. 385,3 triliun atau 60,23% dari total dana perimbangan yang merupakan porsi terbesar. Selanjutnya diikuti besaran DAK pada tahun 2016 yaitu Rp. 163,8 triliun atau 25,61% dari total dana perimbangan dan terakhir besaran DBH pada tahun 2016 yaitu Rp. 90,53 triliun atau 14,15% dari total dana perimbangan. Besaran nilai DAU dari awal desentralisasi pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Sedangkan besaran nilai DBH sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2015. Begitu pula dengan besaran nilai DAK yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2010.

Sehubungan dengan besaran dana perimbangan dari pemerintah pusat yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi kesempatan setiap daerah untuk

mengembangkan ekonomi, sosial budaya dan fisik daerahnya. Sesuai dengan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah dimana mengandung tiga visi utama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan [5]. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam penerapan desentralisasi fiskal pemerintah pusat memberikan transfer dana berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kualitas daerahnya termasuk salah satunya kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

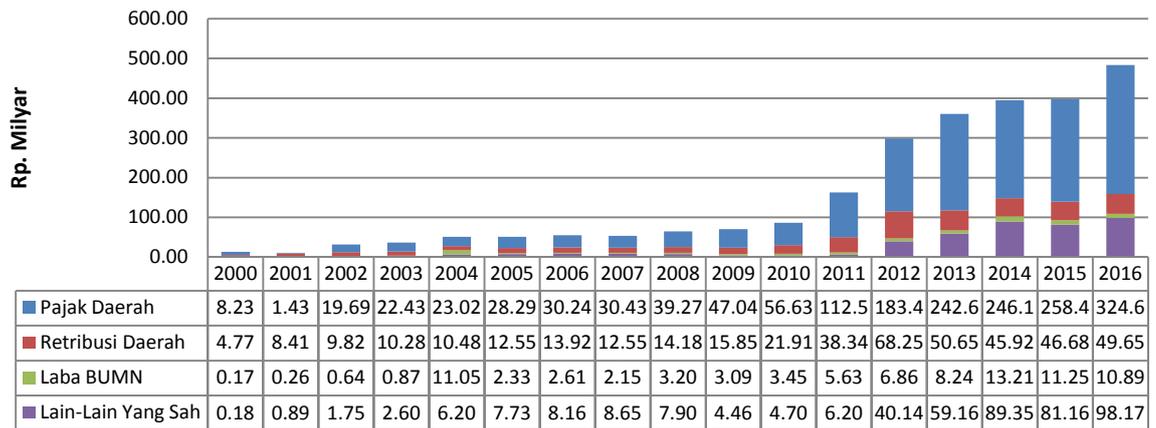
Kedudukan Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung saat ini sedang mengalami pertumbuhan kota yaitu dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin luasnya lahan terbangun. Namun dalam hal ini apakah Kota Bandar Lampung benar-benar mengalami peningkatan kualitas daerahnya dengan baik yang dapat ditinjau aspek ekonomi wilayah. Pengaruh desentralisasi fiskal yang dalam hal ini dilihat dari aspek ekonomi wilayah dengan indikator yang dapat digunakan untuk perubahan ekonomi yaitu besaran nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung [6].

Jika dilihat dari indikator kinerja daerah yaitu PAD dimana capaian peningkatannya rata-rata 20% per tahun, proporsi PAD Kota Bandar Lampung masih cukup jauh dibawahnya meskipun terjadi kenaikan besaran nilai PAD setiap tahunnya. Peningkatan nilai PAD Kota Bandar Lampung yang terlihat signifikan terjadi direntang tahun 2010-2012. Peningkatan yang dicapai pada tahun 2011 dari tahun sebelumnya sebesar 46,73% dan pada tahun 2012 dari tahun sebelumnya sebesar 45,52%.

Dari grafik dibawah dapat lihat perkembangan nilai PAD Kota Bandar Lampung relatif terus meningkat kecuali pada tahun 2001 yang mengalami penurunan sebesar 21,45% dari tahun sebelumnya dan tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 2,15% dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2016 untuk besaran kontribusi tertinggi pada nilai PAD yaitu berasal dari Pajak Daerah yang

selanjutnya diikuti oleh Lain-Lain yang Sah, Retribusi Daerah dan terakhir Laba BUMN [7].

Gambar 1.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Bandar Lampung Tahun 2000-2016



Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2017

Berdasarkan data dan uraian di atas, desentralisasi fiskal belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung sebagai ukuran kinerja keuangan kotanya. Maka penelitian ini perlu dikaji lebih jauh bagaimana dampak dari adanya kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah berdasarkan nilai PAD di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Terjadinya desentralisasi fiskal diharapkan untuk setiap daerah dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat diberikan untuk membantu pemerintah daerah yaitu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan [5]. Namun setiap daerah termasuk Kota Bandar Lampung masih belum tuntas dalam mencapai tujuan-tujuan diadakannya desentralisasi fiskal tersebut. Salah satunya yaitu masih belum tercapainya indikator kinerja daerah dilihat dari peningkatan nilai PAD tiap tahun

sehingga diperkirakan bahwa banyaknya transfer dana dari pusat berupa dana perimbangan membuat pemerintah Kota Bandar Lampung belum mampu meningkatkan ekonomi wilayahnya untuk kualitas daerahnya sendiri menuju lebih baik. Penting bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengetahui seberapa pengaruh desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan dengan adanya dana perimbangan berupa DAU, DAK dan DBH sejak tahun 2000 sampai saat ini untuk ekonomi wilayahnya.

Berdasarkan uraian persoalan yang terjadi dalam desentralisasi fiskal diatas maka terdapat pertanyaan penelitian untuk diteliti lebih lanjut, yaitu *Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung?*

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka studi ini memiliki tujuan yaitu **analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung.**

Untuk mencapai tujuan tersebut adapun sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Analisis pengaruh dan hubungan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dengan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung.
- b. Analisis hubungan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dengan komponen Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung.
- c. Identifikasi pusat-pusat pertumbuhan kota akibat diterapkannya sistem desentralisasi fiskal berdasarkan BWK (Bagian Wilayah Kota) di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari studi yang dilakukan yaitu memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dengan nilai PAD sebagai pengaruh dari desentralisasi fiskal dan juga dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi semua pihak yang ingin mengkaji pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini dapat

menjadi pertimbangan serta sebagai rekomendasi kepada pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Bandar Lampung sebagai upaya peningkatan kualitas ekonomi kotanya dilihat dari nilai PAD.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

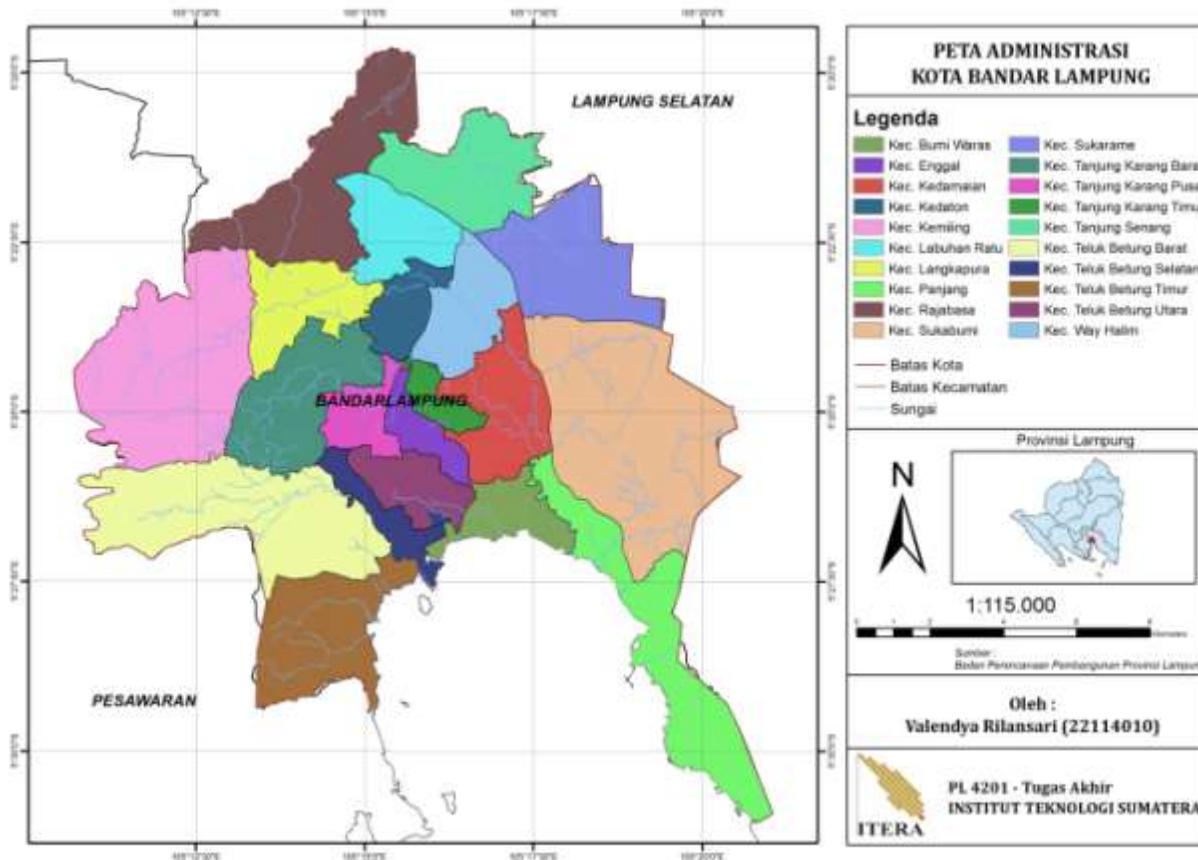
Ruang lingkup pembahasan ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi pada penelitian.

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian disini yaitu berlokasi di Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang memiliki batasan administrasi sebagai berikut.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penelitian disini yaitu berfokus pada desentralisasi fiskal yang diterapkan dengan tujuan pencapaian daerah yang semakin baik. Kemudian untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan tersebut terhadap kinerja keuangan daerah dengan variabel berupa PAD di Kota Bandar Lampung yang juga merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Adapun variabel yang meliputi dana perimbangan yaitu DAU, DAK dan DBH.



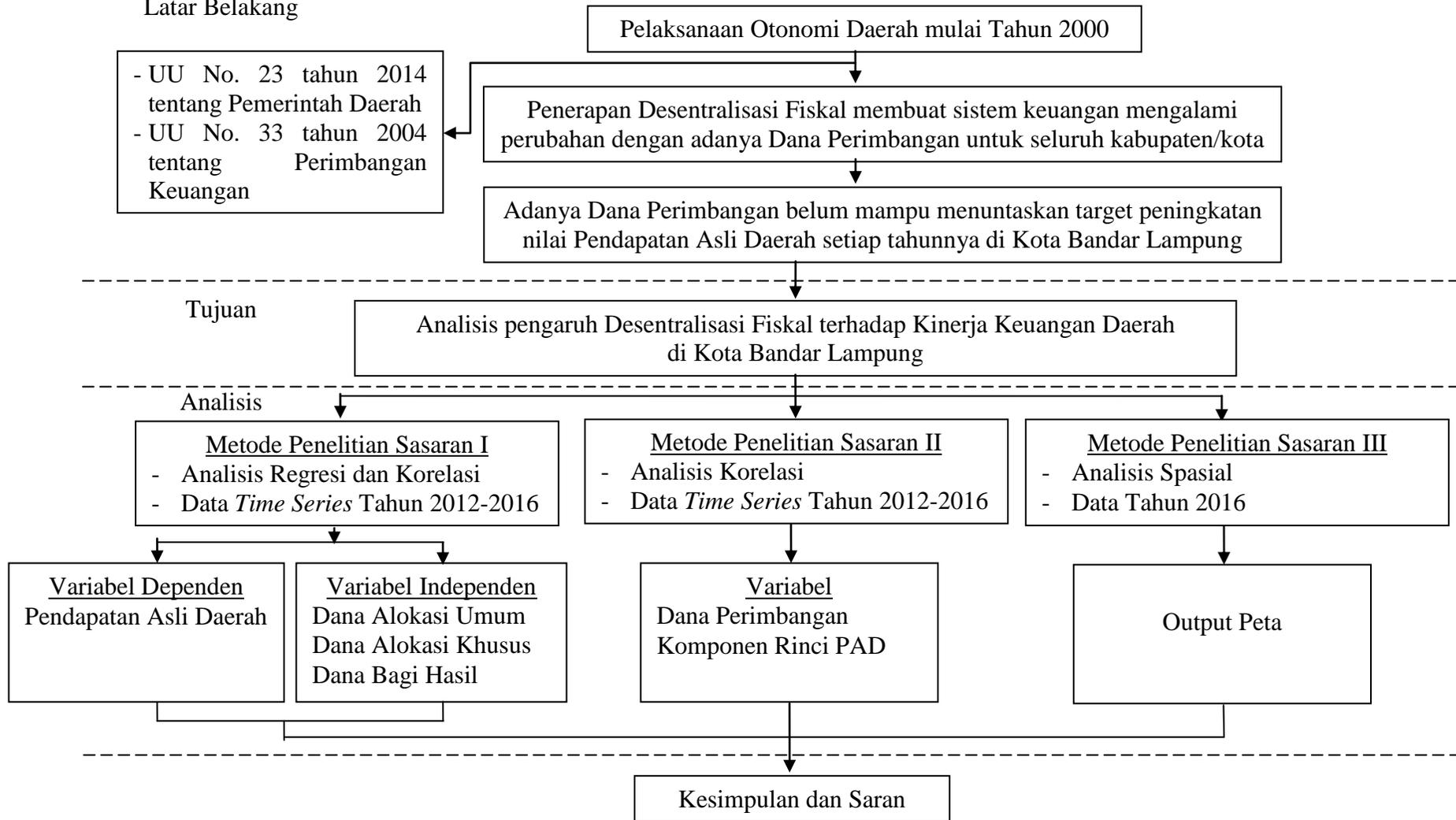
Gambar 1.3

Peta Administrasi Kota Bandar Lampung

Sumber: Modifikasi Penulis dari BAPPEDA Kota Bandar Lampung, 2017

1.6 Kerangka Berpikir

Latar Belakang



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 6 bab. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pemikiran awal penelitian tugas akhir berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan kerangka berpikir.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, seperti teori mengenai desentralisasi fiskal, teori kinerja keuangan daerah, serta tinjauan penelitian yang telah dilakukan.

BAB III METODOLOGI

Dalam bab ini berisi metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu jenis dan sumber data serta metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum Kota Bandar Lampung dan akan lebih berfokus pada kondisi ekonomi perkotaan dengan nilai Pendapatan Asli Daerah dan alokasi Dana Perimbangan di Kota Bandar Lampung yang mempengaruhinya.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jawaban atas tiap sasaran penelitian dengan menggunakan analisis yang sudah ditentukan diawal. Sasaran penelitian terdapat tiga sasaran yaitu melihat bagaimana pengaruh dana-dana transfer berupa DAU, DAK dan DBH terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan PAD Kota Bandar Lampung. Selain itu juga dilihat seberapa

besar hubungan antara ketiga Dana Perimbangan diatas dengan nilai PAD sebagai jawaban dari tiga sasaran tersebut.

BAB VI KESIMPULAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan akhir hasil penelitian. Pada bagian bab ini terdiri dari beberapa hal penjelasan, diantaranya kesimpulan secara keseluruhan, rekomendasi, kelemahan studi, dan saran bagi studi lanjutan.